



Sistem Pendidikan Jepang dan Amerika Serikat

Okta Viani^{1*}, Leppe Firmansyah²

¹⁻²Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

*Penulis Korespondensi: bengkuluoktaviani@gmail.com¹

Abstrac: *This study examines the education systems of Japan and the United States with the aim of identifying their main characteristics, strengths, and weaknesses in addressing global challenges. The Japanese education system emphasizes discipline, cooperation, and character building as the foundation for academic achievement and moral development. Meanwhile, the American education system prioritizes creativity, freedom of expression, and an individual-centered approach that encourages critical thinking and innovation. The comparison reveals fundamental differences in educational philosophy and classroom practices, particularly in curriculum design, teacher-student interaction, and assessment methods. Despite these differences, both systems share a common vision of preparing competent and adaptable generations capable of contributing to the global society. The findings of this study are expected to provide valuable insights for the development of Indonesia's education system, especially in formulating policies that combine Japan's strong character-based education and the United States' innovation-oriented learning. By integrating these strengths, Indonesia can create a more holistic and globally competitive education framework suitable for the 21st century.*

Keywords: *Comparison; Education System; Global Education; Japan; United States.*

Abstrak. Penelitian ini membahas sistem pendidikan di Jepang dan Amerika Serikat dengan tujuan untuk mengidentifikasi karakteristik utama, kelebihan, serta kelemahan masing-masing sistem dalam menghadapi tantangan global. Sistem pendidikan Jepang menekankan pada disiplin, kerja sama, serta pembentukan karakter sebagai dasar bagi pencapaian akademik dan pengembangan moral. Sementara itu, sistem pendidikan Amerika Serikat mengedepankan kreativitas, kebebasan berekspresi, serta pendekatan individual yang mendorong kemampuan berpikir kritis dan inovatif. Perbandingan ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam filosofi pendidikan, kurikulum, interaksi guru-siswa, dan metode evaluasi yang digunakan di kedua negara. Meskipun berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencetak generasi yang kompeten, adaptif, dan siap berkontribusi dalam masyarakat global. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem pendidikan di Indonesia, khususnya dalam merancang kebijakan yang memadukan karakter kuat pendidikan Jepang dengan semangat inovasi pendidikan Amerika Serikat. Melalui sinergi kedua pendekatan tersebut, Indonesia dapat membangun sistem pendidikan yang lebih holistik, relevan, dan berdaya saing di abad ke-21.

Kata Kunci: Amerika Serikat; Jepang; Pendidikan Global; Perbandingan; Sistem Pendidikan.

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun peradaban manusia, sebab melalui pendidikanlah suatu bangsa mampu menyiapkan generasi yang unggul, kompetitif, dan berdaya saing global. Peran pendidikan tidak hanya terbatas pada pengembangan aspek kognitif semata, melainkan juga menyangkut pembentukan karakter, etika, moral, serta keterampilan sosial yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Setiap negara tentu memiliki cara pandang yang berbeda dalam mengembangkan sistem pendidikannya, bergantung pada latar belakang sejarah, budaya, dan filosofi bangsa tersebut. Dalam hal ini, Jepang dan Amerika Serikat merupakan dua negara maju yang menarik untuk dikaji lebih

dalam karena keduanya berhasil melahirkan sistem pendidikan yang berbeda secara orientasi, namun sama-sama mampu mencetak manusia yang kompeten di tingkat internasional.

Sistem pendidikan di Jepang dibangun di atas fondasi budaya disiplin dan kebersamaan. Sejarah panjang Jepang dalam menghadapi tantangan, terutama setelah Perang Dunia II, membuat bangsa ini menekankan pendidikan sebagai instrumen utama untuk membangkitkan kembali perekonomian dan martabat nasional. Sekolah di Jepang tidak hanya menjadi tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga arena pembentukan nilai-nilai sosial, etos kerja, serta tanggung jawab kolektif. Melalui berbagai praktik keseharian, seperti kebiasaan menjaga kebersihan sekolah, penghormatan kepada guru, hingga aktivitas belajar kelompok, pendidikan di Jepang berfungsi untuk melatih generasi muda agar terbiasa dengan kerja sama, ketaatan pada aturan, dan disiplin tinggi.

Sementara itu, Amerika Serikat membangun sistem pendidikan dengan corak yang berbeda, yaitu menekankan pada kebebasan individu, inovasi, dan kompetisi. Pendidikan di negeri ini dipandang sebagai sarana untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi setiap peserta didik dalam mengembangkan potensi diri. Sistemnya yang fleksibel memungkinkan siswa memilih jalur pendidikan sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Orientasi student-centered menjadi ciri khas yang membedakan dengan Jepang, di mana siswa didorong untuk berani berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Model ini kemudian melahirkan tradisi akademik yang kuat, terutama dalam menghasilkan berbagai inovasi teknologi, penelitian ilmiah, dan pemikiran baru yang diakui dunia.

Jika dicermati lebih dalam, kedua sistem pendidikan tersebut berangkat dari filosofi yang berbeda: Jepang dengan kolektivitasnya dan Amerika dengan individualismenya. Perbedaan ini membawa dampak langsung pada metode pengajaran, interaksi guru-murid, serta kurikulum yang diterapkan. Jepang lebih menekankan keseragaman demi menjaga harmoni sosial, sedangkan Amerika memberikan ruang pada keberagaman demi mengoptimalkan kebebasan berpikir. Namun demikian, keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni menyiapkan generasi muda agar mampu berkontribusi bagi kemajuan bangsa sekaligus bersaing di tingkat global.

Keberhasilan Jepang dalam menanamkan nilai kedisiplinan serta kebersamaan menjadikan bangsa tersebut dikenal dengan produktivitas tinggi dan budaya kerja keras. Hal ini tercermin dari kemampuan Jepang menjadi salah satu negara dengan perekonomian terkuat di dunia meskipun memiliki keterbatasan sumber daya alam. Di sisi lain, keberhasilan Amerika Serikat dalam menumbuhkan kreativitas dan inovasi menjadikannya sebagai pusat kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, serta industri modern. Kedua negara ini menunjukkan bahwa

pendidikan yang efektif bukan hanya tentang kurikulum, tetapi juga menyangkut filosofi dasar dan nilai yang ditanamkan sejak dini kepada peserta didik.

Dalam konteks globalisasi, sistem pendidikan Jepang dan Amerika Serikat patut dijadikan objek kajian perbandingan. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk menemukan perbedaan maupun persamaan di antara keduanya, tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi negara lain, termasuk Indonesia, yang tengah berupaya memperbaiki kualitas pendidikannya. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan dari kedua sistem tersebut, Indonesia dapat mengadopsi nilai-nilai positif yang relevan, misalnya kedisiplinan dari Jepang dan kreativitas dari Amerika Serikat, untuk menciptakan sistem pendidikan yang seimbang antara karakter dan kompetensi.

Oleh karena itu, penelitian mengenai sistem pendidikan Jepang dan Amerika Serikat menjadi penting sebagai upaya memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan perbandingan. Dengan menelaah bagaimana kedua negara tersebut merancang strategi, kurikulum, serta orientasi pendidikan, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara filosofi bangsa dengan capaian pendidikan yang diraih. Kajian ini juga dapat menjadi bahan refleksi kritis untuk membangun sistem pendidikan yang lebih adaptif, relevan, dan mampu menjawab tantangan zaman di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Profil Negara Jepang

Jepang atau dalam bahasa lokal disebut Nihon/Nippon, adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Asia Timur dengan ibu kota Tokyo. Bentuk pemerintahannya adalah monarki konstitusional, di mana Kaisar berperan sebagai simbol negara dan pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri bersama kabinetnya. Jepang terdiri atas empat pulau utama, yakni Honshu, Hokkaido, Kyushu, dan Shikoku, serta ribuan pulau kecil lainnya yang membentang di Samudera Pasifik. Jumlah penduduknya sekitar 125 juta jiwa, menjadikan Jepang salah satu negara dengan populasi terbanyak di dunia. Negara ini juga memiliki posisi penting dalam percaturan global, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun kebudayaan. Mata uang resminya adalah Yen, sedangkan bahasa resmi yang digunakan masyarakatnya adalah bahasa Jepang. (Sari, 2019)

Sebagai salah satu negara maju, Jepang dikenal dengan kekuatan ekonominya yang menempati posisi tiga besar dunia. Keberhasilan ekonomi Jepang banyak ditopang oleh sektor industri otomotif, elektronik, teknologi informasi, robotika, hingga budaya populer seperti anime, manga, dan film. Jepang juga terkenal karena budayanya yang unik, yaitu perpaduan antara tradisi kuno dan modernitas. Nilai-nilai seperti kerja keras, disiplin, rasa tanggung

jawab, sopan santun, serta kebersamaan menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Jepang. Faktor inilah yang menjadikan Jepang sebagai bangsa yang mampu bangkit dengan cepat setelah kehancuran akibat Perang Dunia II dan kemudian tumbuh menjadi salah satu negara dengan pengaruh besar di dunia (Utami, 2020).

Dalam bidang pendidikan, Jepang memiliki sistem yang terstruktur dan berorientasi pada pembentukan karakter selain penguasaan ilmu pengetahuan. Pendidikan diwajibkan selama sembilan tahun, yaitu enam tahun di sekolah dasar (Shōgakkō) dan tiga tahun di sekolah menengah pertama (Chūgakkō). Sebelum itu, anak-anak biasanya mengikuti taman kanak-kanak (Yōchien) mulai usia 3 hingga 6 tahun, walaupun sifatnya tidak wajib. Setelah menamatkan pendidikan wajib, mereka dapat melanjutkan ke sekolah menengah atas (Kōkō) selama tiga tahun, kemudian ke perguruan tinggi atau universitas. Pemerintah Jepang sangat menekankan pemerataan pendidikan, sehingga sekolah negeri tersebar merata di seluruh wilayah. Hal ini menjadikan tingkat melek huruf masyarakat Jepang sangat tinggi dan kualitas pendidikannya diakui dunia. (Hidayat, 2021)

Selain aspek akademik, sistem pendidikan Jepang juga menekankan pentingnya pendidikan moral, kedisiplinan, dan kemandirian. Siswa tidak hanya belajar di ruang kelas, tetapi juga dilibatkan dalam kegiatan kebersihan sekolah, kerja kelompok, serta aktivitas ekstrakurikuler yang mengasah kemampuan sosial dan kepemimpinan. Kurikulum Jepang juga memberikan ruang bagi pembentukan karakter melalui pelajaran etika, budaya, dan keterampilan hidup. Dengan model pendidikan yang menyeluruh ini, Jepang berhasil mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter kuat, beretika, serta siap menghadapi tantangan global. Sistem pendidikan yang konsisten dan terarah inilah yang menjadi salah satu kunci keberhasilan Jepang dalam mempertahankan posisinya sebagai negara maju hingga saat ini. (Lestari, 2020)

Sistem Pendidikan di Jepang

Sistem pendidikan di Jepang merupakan salah satu yang paling maju dan terstruktur di dunia, dengan tujuan utama mencetak sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter moral, disiplin, serta tanggung jawab sosial yang tinggi. Pendidikan di Jepang dikenal dengan model 6-3-3-4, yakni enam tahun sekolah dasar (Shōgakkō), tiga tahun sekolah menengah pertama (Chūgakkō), tiga tahun sekolah menengah atas (Kōtōgakkō), dan empat tahun pendidikan tinggi (Daigaku). Selain itu, ada pula pendidikan anak usia dini (Yōchien) yang meskipun tidak wajib, sangat populer di kalangan masyarakat Jepang karena dipandang sebagai pondasi pembentukan sikap, kebiasaan, dan keterampilan sosial sejak dini. Pemerintah Jepang mewajibkan pendidikan sembilan tahun

pertama secara gratis, yaitu enam tahun di sekolah dasar dan tiga tahun di sekolah menengah pertama, sehingga angka partisipasi sekolah di Jepang sangat tinggi dan tingkat buta huruf hampir nol. (Hanifa & all, 2024)

Di sekolah dasar, fokus utama pendidikan bukan hanya pada penguasaan literasi dan numerasi, tetapi juga pada pembentukan karakter melalui kegiatan sehari-hari yang menanamkan disiplin, tanggung jawab, dan rasa kebersamaan. Siswa diajarkan untuk membersihkan kelas, menyajikan makanan, menjaga taman sekolah, serta melaksanakan kegiatan kelompok yang mendorong kebersamaan dan kolaborasi. Hal ini mencerminkan filosofi pendidikan Jepang bahwa sekolah bukan hanya tempat memperoleh ilmu, melainkan juga arena sosialisasi untuk membentuk warga negara yang memiliki moralitas tinggi, bekerja sama dalam masyarakat, dan menghargai norma sosial. (Savitri & all, 2022)

Jenjang pendidikan menengah pertama (SMP) merupakan masa transisi yang menekankan pembekalan pengetahuan umum lebih luas, keterampilan dasar akademik, dan pembentukan identitas remaja. Di sini, siswa mulai dikenalkan dengan sistem evaluasi yang lebih kompetitif, terutama menjelang masuk ke jenjang sekolah menengah atas (SMA). Sekolah menengah atas di Jepang memiliki peran penting sebagai pintu masuk menuju pendidikan tinggi atau dunia kerja. Ada tiga jenis sekolah menengah atas: akademik, kejuruan, dan teknis, yang dapat dipilih siswa sesuai dengan minat dan rencana karier. Sistem seleksi masuk SMA cukup ketat dengan ujian masuk (*nyūgaku shiken*), sehingga siswa terbiasa menghadapi kompetisi sejak usia dini. (Nurhayati & Sumarni, 2021)

Perguruan tinggi di Jepang terbagi menjadi universitas negeri, swasta, dan nasional. Universitas nasional dikelola langsung oleh pemerintah pusat melalui MEXT (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology), universitas negeri dikelola oleh pemerintah daerah, sedangkan universitas swasta memiliki peran yang sangat besar karena lebih dari 70% mahasiswa Jepang belajar di perguruan tinggi swasta. Pendidikan tinggi ini berfokus tidak hanya pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan riset dan inovasi, sehingga Jepang menjadi salah satu negara dengan kontribusi penelitian teknologi dan sains terbesar di dunia. (Sutrisno, 2020)

Kurikulum pendidikan Jepang ditetapkan secara nasional oleh MEXT, namun pelaksanaannya memberikan ruang fleksibilitas bagi sekolah dan pemerintah daerah. Revisi kurikulum dilakukan setiap sepuluh tahun untuk menyesuaikan kebutuhan zaman. Salah satu ciri khas kurikulum Jepang adalah adanya mata pelajaran pendidikan moral (*dōtoku*) yang bertujuan membentuk watak siswa agar mampu menghargai orang lain, mencintai lingkungan, berdisiplin, serta bertanggung jawab terhadap masyarakat. Pendidikan moral ini tidak hanya

berupa teori dalam kelas, melainkan terintegrasi dengan seluruh kegiatan sekolah, seperti kerja bakti, festival sekolah, kegiatan klub (bukatsu), serta interaksi antara guru dan siswa sehari-hari. (Fitriyah, 2021)

Selain itu, manajemen pendidikan di Jepang juga menempatkan guru sebagai figur sentral dalam pembentukan karakter dan pengetahuan siswa. Guru dipandang bukan hanya sebagai pengajar akademik, tetapi juga teladan moral dan fasilitator pembelajaran sosial. Proses seleksi guru di Jepang sangat ketat, dan mereka diwajibkan mengikuti pelatihan berkelanjutan sepanjang kariernya. Sistem rotasi guru antar sekolah di satu wilayah juga diterapkan untuk pemerataan kualitas pendidikan. Budaya refleksi diri (*hansei*) di kalangan guru menjadi ciri khas, di mana setiap guru terus mengevaluasi praktik mengajarnya untuk selalu memberikan yang terbaik bagi siswa. (Marlina & Rosyada, 2021)

Di sisi lain, sistem pendidikan Jepang juga sangat menekankan pendidikan inklusif. Anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan dukungan melalui sekolah khusus (*tokubetsu shien gakkō*) atau kelas inklusi dalam sekolah reguler dengan bantuan guru khusus. Pemerintah Jepang melalui MEXT mengembangkan Special Needs Education (SNE) untuk memastikan bahwa semua anak, tanpa terkecuali, dapat mengakses pendidikan yang layak. Meskipun begitu, tantangan masih ada, terutama dalam hal distribusi fasilitas dan ketersediaan guru spesialis yang merata di seluruh wilayah. (Lengkong & et al., 2025)

Sistem pendidikan Jepang telah menjadi inspirasi bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Keberhasilan Jepang dalam membangun sistem pendidikan yang berkarakter, disiplin, dan berorientasi pada kebersamaan dianggap sebagai kunci keberhasilan bangsa tersebut dalam mencetak generasi unggul. Nilai-nilai seperti kemandirian, rasa tanggung jawab, dan kerja sama menjadi bagian dari keseharian pendidikan, sehingga siswa Jepang tidak hanya tumbuh menjadi pribadi yang cerdas secara akademik, tetapi juga berakhlak, tangguh, dan mampu beradaptasi dengan tuntutan global.

Tujuan Pendidikan di Jepang

Membangun Karakter Warga Negara Muda yang Autonom dan Proaktif

Sutrisno (UNY, Indonesia) dalam penelitiannya tentang internalisasi pendidikan moral di perguruan tinggi di Jepang menyebut bahwa salah satu tujuan pendidikan moral Jepang adalah membentuk karakter warga muda supaya dapat berpikir secara otonom, bertindak berdasarkan penilaian sendiri, serta mampu hidup proaktif dalam komunitas bersama orang lain. (Sutrisno)

Mentrasformasikan Nilai-nilai Dasar Filosofis Masyarakat Jepang

Penelitian yang sama oleh Sutrisno juga menunjukkan bahwa moral education (pendidikan moral) di perguruan tinggi Jepang digunakan sebagai alat transformasi nilai-nilai filosofis dasar masyarakat Jepang. Artinya, pendidikan bukan hanya transfer ilmu akademik, tapi juga penanaman nilai-nilai budaya, etika, dan sosial yang menjadi ciri khas masyarakat Jepang. (Purwantiningsih, Suharso, & Ismaya, 2018)

Meningkatkan Profesionalitas Guru sebagai Instrumen Perbaikan Pendidikan

Purwantiningsih, Suharso, dan Ismaya dalam jurnal Refleksi Edukatika meneliti “Pendidikan untuk Memecahkan Masalah Bangsa melalui Peningkatan Profesionalisme Guru (Belajar dari Pengalaman Jepang)” dan mendapati bahwa salah satu tujuan penting pendidikan Jepang pasca Perang Dunia II adalah meningkatkan profesionalitas guru. Dengan guru yang profesional, diharapkan permasalahan bangsa dapat diatasi melalui kualitas pendidikan yang lebih baik. (Nurhayati & Sumarni, 2021-2023)

Membangun Disiplin, Kerjasama, dan Tanggung Jawab Sosial melalui Pendidikan Karakter

Studi komparatif antara pendidikan dasar di Indonesia dan Jepang oleh Nurhayati & Sri Sumarni (dan rekan) menunjukkan bahwa tujuan pendidikan karakter di Jepang mencakup pembentukan kedisiplinan, rasa tanggung jawab, semangat kerjasama antar siswa, dan nilai-nilai sosial lainnya.

Manajemen Pendidikan di Jepang

Manajemen pendidikan di Jepang pada dasarnya berorientasi pada prinsip pemerataan, kualitas, dan pembentukan karakter bangsa. Pemerintah Jepang menjadikan pendidikan sebagai tanggung jawab negara sekaligus masyarakat, sehingga pola pengelolaannya terstruktur dari tingkat pusat hingga daerah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains, dan Teknologi (MEXT) memegang peranan utama dalam merumuskan kebijakan pendidikan, kurikulum nasional, serta standar mutu pendidikan. Namun, pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan sekolah agar sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan sistem ini, Jepang mampu menjaga keseragaman standar pendidikan nasional sekaligus fleksibilitas di tingkat sekolah. (Sukardi, 2019)

Salah satu ciri khas manajemen pendidikan di Jepang adalah penekanan pada peran guru sebagai motor utama keberhasilan pendidikan. Guru tidak hanya berperan dalam transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pendidik moral dan pembimbing sosial. Oleh karena itu, Jepang memberikan perhatian besar pada peningkatan profesionalitas guru melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, dan evaluasi kompetensi. Guru juga diberikan kewenangan yang luas

dalam mengelola kelas dan memilih metode pembelajaran yang sesuai, namun tetap berpedoman pada kurikulum nasional yang disusun MEXT. (Purwantiningsih, Suharso, & Ismaya, 2016)

Selain peran guru, manajemen pendidikan di Jepang juga menekankan keterlibatan aktif siswa dan masyarakat dalam kegiatan sekolah. Siswa, misalnya, dilibatkan dalam kegiatan non-akademik seperti membersihkan kelas, mengatur jadwal makan siang bersama, hingga kegiatan ekstrakurikuler yang mengasah keterampilan sosial. Orang tua dan masyarakat sekitar juga turut serta dalam pengelolaan sekolah melalui komite pendidikan dan forum diskusi. Dengan model manajemen partisipatif ini, sekolah bukan hanya menjadi lembaga formal, tetapi juga ruang pembentukan budaya kebersamaan dan kedisiplinan. (Nurhayati & Sumarni, 2021)

Manajemen pendidikan Jepang juga dicirikan oleh penerapan sistem desentralisasi yang memungkinkan adanya inovasi dan kreativitas di tingkat sekolah. Walaupun kurikulum nasional ditentukan oleh pemerintah pusat, sekolah memiliki ruang untuk mengembangkan kurikulum lokal sesuai kebutuhan daerahnya. Prinsip ini bertujuan agar pendidikan tidak hanya menghasilkan lulusan yang cerdas secara akademik, tetapi juga relevan dengan konteks sosial, budaya, dan ekonomi setempat. Dengan manajemen yang terintegrasi, partisipatif, dan konsisten, Jepang berhasil menciptakan sistem pendidikan yang efektif dalam mencetak generasi yang berkarakter, terampil, serta mampu bersaing secara global. (Rahmawati, 2020)

Profil Negara Amerika Serikat

Negara Amerika dikatakan sebagai Negara yang berpenduduk nomor tiga dunia dengan banyaknya penduduk sekitar $\pm$ 275 juta jiwa dan terdiri dari 50 Negara bagian. Luas daerahnya sekitar $\pm$ 9,4 juta km² dan mempunyai variasi yang beragam yang terlihat dari keadaan flora dan faunannya beragam.

Keturunan dari penduduk Amerika berasal dari keturunan Imigran Eropa, misalnya dari Jerman, Inggris, Skotlandia, Irlandia, dan Italia. Sepertiga penduduknya adalah orang Asia-Amerika yang mendiami pesisir barat. Sementara penduduk aslinya disebut penduduk Amerika/Indian. Sedangkan penduduk dari Eksimo sangat sedikit. Agama dari Amerika terdiri dari Kristen, Protestan, Katolik, Yudaisme, Islam, Buddha, Agnostik, Ateis, Hindu dan Universalis Unitarian.

Perkembangan Ekonomi yang ada di Amerika mengikuti pola kapitalis dalam arti usaha bebas. Bagi masyarakat Amerika mempunyai usaha swasta sangat mendukung bagi pertumbuhan ekonomi Amerika. Dalam bidang ekspor-import Amerika sangat terkenal baik dalam bahan mentah, misalnya kayu, karet, bahan tambang, mineral, sampai minyak tanah.

(Abdur Rahman Assegaf, 2003). Usaha dari usaha export ini sangat menunjang juga dalam perekonomian Amerika.

Pada umumnya kebijakan pendidikan yang diambil di suatu Negara cenderung dijadikan alat intervensi negara kepada warga negaranya. Bentuk intervensi itu dapat berupa justifikasi (diakui/tidaknya) ilmu pengetahuan tertentu, pengaturan kelembagaan sekolah, lama pendidikan dan gelar, serta kualifikasi pendidikan yang dikaitkan dengan posisi pekerjaan (jabatan). Pada tataran pendidikan tertentu biasanya akan lebih mudah untuk dilaksanakan intervensi tersebut. Di antara jenjang pendidikan sekolah (mulai dari tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi) yang ada, umumnya Negara lebih memilih mengkonsentrasikan kekuasaannya untuk mengintervensi pendidikan sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak, remaja dan kaum muda. Hampir tidak ada negara yang menaruh perhatian cukup besar pada pendidikan untuk orang-orang dewasa. (Syahid, 2013)

Di negara-negara demokrasi, kesadaran untuk mengawasi dan membatasi intervensi pemerintah pada sektor pendidikan itu ditandai dengan dipilihnya asas desentralisasi dalam pengambilan kebijakan (pengaturan) sector pendidikan. Amerika Serikat adalah salah satu Negara pelopor demokrasi. Sudah sejak lama kebijakan pendidikan di Amerika Serikat menjadi tanggung jawab Pemerintah Negara Bagian (State) dan Pemerintah Daerah (Distrik). Sebelumnya, Pemerintah Pusat memang mengintervensi kebijakan pendidikan, sebagaimana yang terjadi sejak tahun 1872, dimana Pemerintah Pusat AS mengintervensi kebijakan pendidikan dengan cara memberikan tanah negara kepada Negara Bagian untuk pembangunan fakultas-fakultas pertanian dan teknik, membantu sekolah dengan program makan siang, menyediakan pendidikan bagi orang-orang Indian, menyediakan dana pendidikan bagi para veteran yang kembali ke kampus untuk menempuh pendidikan lanjutan, menyediakan pinjaman bagi mahasiswa, menyediakan anggaran untuk keperluan penelitian, pertukaran mahasiswa asing dan bantuan berbagai kebutuhan mahasiswa lainnya, serta memberikan bantuan tidak langsung (karena menurut ketentuan Undang-Undang Amerika Serikat pemerintah dilarang memberikan bantuan langsung) kepada sekolah-sekolah agama dalam bentuk buku-buku teks dan laboratorium. Namun semenjak masa Pemerintahan Presiden Ronald Reagan, intervensi Pemerintah Pusat AS terhadap pendidikan mulai dikurangi. Hal ini terungkap dalam kepercayaan Reagan bahwa pemerintah terlalu mencampuri kehidupan masyarakat. Ia ingin mengurangi program-program yang menurutnya tidak dibutuhkan rakyat dengan menghapus "pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan." Selanjutnya tanggung jawab dan inisiatif kebijakan pendidikan diserahkan kepada Negara Bagian (setingkat Propinsi) dan Pemerintah Daerah/Distrik (setingkat Kabupaten/Kota). Di Amerika Serikat terdapat 50

negara bagian dan 15.358 distrik. Jadi sebanyak itu lembaga yang diberi kewenangan dan otonomi untuk mengelola pendidikan.

Sistem Pendidikan di Amerika Serikat

Dalam sistem pendidikan Amerika Serikat, terdapat beberapa pola struktur pendidikan, baik pada tingkat dasar dan menengah, maupun pada tingkat pendidikan tinggi. Pada tingkat dasar dan menengah terdapat pola sebagai berikut: (Hidayah, 2018)

- a. Taman Kanak-Kanak + Pendidikan Dasar "grade" 1-8 + 4 tahun SLTA.
- b. Taman Kanak-Kanak + Sekolah Dasar grade 1-6+3 tahun SLTP+3 tahun SLTA.
- c. Taman Kanak-Kanak + Sekolah Dasar "grade" 1-4/5+ 4 tahun SLTP + 4 tahun SLTA
- d. Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat taman Kanak-Kanak 12 tahun, pada beberapa buah Negara bagian, dilanjutkan 2 tahun pada tingkat akademi (Junior/Community Collage) sebagai bagian dari system pendidikan dasar menengah.

Amerika menerapkan model pendidikan yang berbeda dengan negara-negara persemakmuran Inggris, hal ini dikarenakan Amerika mencoba melakukan pendekatan *humanity perspective*. Hal urusan pendidikan diurus oleh Department of Education/Kementrian Pendidikan. Departemen of Education berkedudukan di ibu kota negara/Washington DC hanya sebagai pengendali umum saja. Sementara kebijakan2 ada pada department of Education di setiap negara bagian. Sekolah dasar dan menengah adalah wajib bagi seluruh siswa di Amerika Serikat, akan tetap jenjang usia siswa berbeda-beda di setiap Negara bagian. Siswa di Amerika Serikat memulai pendidikannya dari jenjang Kindergarten (usia 5 sampai 6 tahun) hingga menyelesaikan pendidikan menengah pada kelas 12 (usia 18 tahun). Terdapat 14.000 sekolah di Amerika Serikat dan setiap tahunnya pemerintah Amerika Serikat mengalokasikan dana pendidikan sebesar \$500 triliun untuk digunakan keperluan sekolah dasar dan menengah. Pendidikan dasar di Amerika Serikat berjenjang dari Kindergarten hingga Fifth grade (Kelas 5), tetapi terkadang juga berjenjang hingga Fourth grade (kelas 4), Sixth grade (kelas 6) atau eighth grade (kelas 8) tergantung sistem kurikulum pada school district tersebut. (Mardiana)

Tujuan Pendidikan di Amerika Serikat

Sistem pendidikan di Amerika Serikat (AS) mencerminkan ciri dari sistem pemerintahan di sana yaitu federal dengan desentralisasi melalui pemerintahan negara-negara bagian (states). Penanggung jawab utama sistem pendidikan di sana adalah departemen pendidikan pemerintah federal di Washington D.C, namun kegiatan sehari-hari didelegasikan penuh kepada pemerintah setiap Negara bagian yang kemudian mendelegasikannya lagi

kepada Kantor Pendidikan Distrik (Public School District), dan kepada badan-badan penyalang college dan universitas. (Prasetyo, 2017)

Sebagaimana dideskripsikan di atas bahwa karakteristik utama politik sistem pendidikan Amerika Serikat adalah menonjolnya desentralisasi. Pemerintah Pusat sangat memberi otonomi seluas-luasnya kepada Pemerintah di bawahnya, yaitu Negara Bagian dan Pemerintah Daerah (Distrik). Meskipun Amerika Serikat tidak mempunyai sistem pendidikan yang terpusat atau yang bersifat nasional, akan tetapi bukan berarti tidak ada rumusan tentang tujuan pendidikan yang berlaku secara nasional. Tujuan sistem pendidikan Amerika secara umum dirumuskan dalam 5 poin sebagai berikut:

- a. Untuk mencapai kesatuan dalam keragaman;
- b. Untuk mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi;
- c. Untuk membantu pengembangan individu;
- d. Untuk memperbaiki kondisi social masyarakat;
- e. Untuk mempercepat kemajuan nasional.

Di luar 5 tujuan tersebut, Amerika Serikat mengembangkan visi dan misi pendidikan gratis bagi anak usia sekolah untuk masa 12 tahun pendidikan awal, dan biaya pendidikan relatif murah untuk tingkat pendidikan tinggi.

Manajemen Pendidikan di Amerika Serikat

Manajemen pendidikan di AS dikembangkan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Negara Bagian dan Pemerintah Daerah setempat. Hal ini dilakukan mengingat AS adalah Negara dengan system desentralisasi. Di tingkat nasional (federal/pusat) dibentuk satu departemen, yaitu Departemen Pendidikan Federal. Jadi meski dalam sistem pendidikan di Amerika, sekolah adalah tanggung jawab pemerintah lokal, Departemen Pendidikan menyediakan kepemimpinan nasional untuk menjawab isu-isu penting dalam pendidikan Amerika. Departemen ini dipimpin oleh seorang setaraf Sekretaris Kabinet. Tugas departemen ini adalah melaksanakan semua kebijakan pemerintah federal dalam sektor pendidikan di semua tingkatan pemerintahan dan untuk semua jenjang pendidikan. Tetapi, karena sebagian besar kewenangan dan tanggung jawab pendidikan sudah diserahkan kepada Negara Bagian dan Pemerintah Daerah, maka Departemen Pendidikan Federal hanya menjalankan monitoring dan pengawasan saja. (Sutopo, 2015)

Di tingkat Negara Bagian dibentuk sebuah badan yang diberi nama Board of Education. Badan ini bertugas dan berfungsi membuat kebijakan kebijakan serta menentukan anggaran pendidikan untuk masing-masing wilayah (Negara Bagian) nya, khususnya berkenaan dengan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Selanjutnya, untuk menangani permasalahan

yang berkaitan dengan hal-hal yang lebih teknis (yaitu; tentang kurikulum sekolah, penentuan persyaratan sertifikasi, guru-guru, dan pembiayaan sekolah) dibentuk sebuah bagian pendidikan yang disebut sebagai *comissioner*, sering juga disebut sebagai *superintendent*. Bagian ini dipimpin oleh seorang yang ditunjuk oleh Board of Education atau oleh Gubernur.

Untuk beberapa Negara Bagian, pimpinan Bagian Pendidikan ini dipilih oleh masyarakat ada. Sementara itu pada level operasional, pelaksanaan manajemen pendidikan dijalankan oleh unit-unit yang lebih rendah, bahkan banyak secara langsung dilaksanakan oleh masing-masing sekolah yang bersangkutan. Para pimpinan atau Kepala Sekolah pada prinsipnya memiliki kebebasan dan otonomi yang luas untuk menjalankan manajemen operasional pendidikan. Khusus untuk menangani kebijakan Pendidikan Tinggi, manajemen pendidikan Amerika Serikat yang dikembangkan oleh Negara-Negara Bagian memisahkan antara Badan yang memberi izin pendirian Perguruan Tinggi (Negeri dan Swasta) dengan Badan yang merumuskan kebijakan akademik serta keuangan. Badan yang menangani kebijakan akademik dan keuangan untuk pendidikan Tinggi adalah *board of trustees*. Untuk Perguruan Tinggi Negeri anggota badan tersebut ditunjuk oleh Gubernur Negara Bagian. Ada juga yang dipilih dari dan oleh kelompok yang akan diwakili. Sedangkan untuk Perguruan Tinggi Swasta anggota badan tersebut dipilih dari perguruan tinggi masing-masing. (Hidayah, 2019)

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan artikel akademik yang membahas sistem pendidikan di Jepang dan Amerika Serikat.

Analisis dilakukan melalui tahapan:

- a. Pengumpulan data, yaitu mengidentifikasi sumber-sumber literatur yang relevan tentang sistem pendidikan kedua negara.
- b. Klasifikasi data, dengan mengelompokkan informasi ke dalam tema-tema utama seperti struktur pendidikan, tujuan pendidikan, manajemen pendidikan, dan filosofi pendidikan.
- c. Analisis komparatif, yaitu membandingkan karakteristik, keunggulan, dan kelemahan sistem pendidikan di Jepang dan Amerika Serikat untuk menemukan persamaan dan perbedaan mendasar.
- d. Interpretasi hasil, yakni menarik makna dan implikasi dari temuan tersebut terhadap pengembangan sistem pendidikan di Indonesia.

- e. Metode ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena sosial dan kebijakan pendidikan yang kompleks tanpa perlu melakukan eksperimen atau survei lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Sistem Pendidikan Jepang

Sistem pendidikan Jepang dikenal dengan struktur 6-3-3-4 (enam tahun SD, tiga tahun SMP, tiga tahun SMA, dan empat tahun perguruan tinggi). Pendidikan wajib berlangsung selama sembilan tahun dan menekankan pembentukan karakter, disiplin, kerja sama, dan tanggung jawab sosial.

Nilai-nilai seperti kebersamaan (collectivism) dan ketaatan terhadap norma sosial diintegrasikan ke dalam kurikulum melalui kegiatan moral education (dōtoku) dan praktik keseharian di sekolah, seperti menjaga kebersihan, makan bersama, dan kerja kelompok.

Guru memiliki peran sentral tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan moral. Pemerintah Jepang melalui MEXT (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology) mengatur kurikulum nasional secara ketat, namun tetap memberi ruang bagi inovasi lokal.

Hasilnya, Jepang mampu mencetak lulusan yang unggul dalam akademik sekaligus berkarakter kuat, serta berhasil mempertahankan mutu pendidikan yang merata di seluruh wilayah.

Karakteristik Sistem Pendidikan Amerika Serikat

Berbeda dengan Jepang, sistem pendidikan di Amerika Serikat bercorak desentralisasi. Setiap negara bagian memiliki kewenangan luas dalam menetapkan kebijakan, kurikulum, dan pembiayaan pendidikan. Prinsip utama yang dipegang adalah student-centered learning yang menekankan kreativitas, kebebasan berekspresi, dan pengembangan potensi individu.

Struktur pendidikannya bervariasi antardaerah, namun secara umum meliputi 12 tahun pendidikan dasar-menengah (K-12) dan diikuti oleh pendidikan tinggi. Pemerintah federal hanya berfungsi sebagai pengawas umum, sementara pelaksanaan diserahkan ke state board of education dan local school districts.

Keunggulan sistem ini terletak pada fleksibilitas dan kebebasan yang memungkinkan siswa menyesuaikan pendidikan dengan minat dan bakat masing-masing. Namun, desentralisasi yang kuat juga menyebabkan adanya kesenjangan kualitas antarwilayah dan mahal biaya pendidikan tinggi.

Perbandingan Sistem Pendidikan Jepang dan Amerika Serikat

Tabel 1. Perbandingan Sistem Pendidikan.

Aspek	Jepang	Amerika Serikat
Filosofi Pendidikan	Kolektivisme, harmoni sosial, disiplin	Individualisme, kebebasan, kreativitas
Struktur Pendidikan	Terpusat dan seragam (6-3-3-4)	Desentralisasi, bervariasi antardaerah
Pendekatan Pembelajaran	Guru-sentris dengan penanaman nilai moral	Siswa-sentris dengan penekanan pada inovasi
Peran Guru	Teladan moral dan agen pembentuk karakter	Fasilitator pembelajaran dan pengembang potensi
Kelebihan Utama	Pemerataan mutu, pembentukan karakter	Fleksibilitas, inovasi, dan pengembangan kreativitas
Kelemahan Utama	Tekanan akademik tinggi, kurang ruang ekspresi	Ketimpangan mutu dan biaya pendidikan tinggi

Implikasi bagi Pendidikan di Indonesia

Hasil kajian menunjukkan bahwa kedua sistem memiliki nilai-nilai positif yang dapat diadaptasi oleh Indonesia. Dari Jepang, Indonesia dapat meniru disiplin, tanggung jawab sosial, dan pendidikan karakter yang terintegrasi dalam kehidupan sekolah. Dari Amerika Serikat, dapat diambil fleksibilitas kurikulum dan penghargaan terhadap kreativitas individu. Kombinasi antara kedisiplinan dan kebebasan berpikir diharapkan mampu membentuk sistem pendidikan Indonesia yang seimbang antara karakter dan kompetensi, sehingga relevan dengan tuntutan era global.

4. KESIMPULAN

Sistem pendidikan Jepang memiliki karakteristik yang sangat khas, yakni pola 6-3-3-4 yang dijalankan secara nasional dengan standar ketat dari pemerintah pusat melalui MEXT. Pendidikan diwajibkan selama sembilan tahun pertama dan menekankan keseragaman standar akademik sekaligus pembentukan karakter siswa. Kedisiplinan, kebersihan, kerja sama, dan tanggung jawab sosial bukan hanya diajarkan secara teoritis, melainkan dipraktikkan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Hal ini menjadikan siswa Jepang terbiasa hidup dalam keteraturan, menghargai waktu, serta mengutamakan kepentingan bersama. Dengan sistem ini, Jepang mampu menghasilkan lulusan yang unggul secara akademis sekaligus berkarakter kuat, sehingga dapat menopang kemajuan bangsa di berbagai bidang.

Di sisi lain, sistem pendidikan Amerika Serikat memiliki sifat yang berbeda karena lebih menonjolkan prinsip desentralisasi. Kurikulum ditetapkan secara umum oleh pemerintah federal, tetapi implementasi dan pengembangannya diserahkan kepada masing-masing negara bagian, distrik sekolah, bahkan sekolah itu sendiri. Hal ini menyebabkan adanya variasi yang sangat beragam dalam sistem pendidikan di Amerika. Meski begitu, keunggulannya adalah

fleksibilitas yang memungkinkan sekolah menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal dan perkembangan zaman. Sistem ini juga memberikan ruang luas bagi siswa untuk mengeksplorasi minat, bakat, serta kreativitasnya melalui pendekatan student-centered learning.

Perbedaan yang mencolok dari kedua sistem ini terletak pada orientasinya. Jepang menekankan kolektivitas, disiplin, dan keseragaman, sementara Amerika Serikat menekankan kebebasan individu, keragaman, dan inovasi. Jepang mendidik siswa agar menjadi bagian dari masyarakat yang tertib, taat aturan, dan memiliki rasa tanggung jawab sosial tinggi. Sebaliknya, Amerika Serikat mendorong siswanya untuk tumbuh sebagai individu yang kritis, mandiri, kreatif, dan mampu bersaing di dunia global. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan, tetapi sama-sama membuktikan diri sebagai sistem pendidikan yang mampu mencetak generasi unggul sesuai kebutuhan bangsanya.

Jika dibandingkan, Jepang unggul dalam hal pemerataan kualitas pendidikan, profesionalisme guru, serta integrasi pendidikan karakter dalam kegiatan sekolah. Hampir semua sekolah di Jepang memiliki standar yang sama, sehingga kualitas pendidikan antara kota besar dan daerah terpencil relatif merata. Sementara itu, Amerika Serikat unggul dalam hal inovasi pembelajaran, pemanfaatan teknologi, serta variasi jalur pendidikan yang disediakan bagi siswa. Fleksibilitas tersebut memungkinkan siswa untuk menemukan jalannya sendiri menuju keberhasilan sesuai bakat dan minat.

Meskipun demikian, kedua sistem juga menghadapi tantangan masing-masing. Jepang menghadapi tekanan akademik yang tinggi, sehingga siswa seringkali mengalami stres akibat persaingan ketat terutama saat menghadapi ujian masuk sekolah menengah dan universitas. Sedangkan Amerika Serikat menghadapi tantangan berupa ketidakmerataan kualitas pendidikan antar wilayah, terutama antara daerah kaya dan miskin, serta persoalan mahal biaya pendidikan tinggi. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa tidak ada sistem yang sempurna, melainkan selalu perlu evaluasi dan inovasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syahid, Sistem Pendidikan Amerika Serikat dan Relevansinya bagi Indonesia, Jurnal Ilmiah Didaktika, Vol. 13, No. 2, 2013
- Bambang Sutopo, Kebijakan Pendidikan di Amerika Serikat dan Implikasinya terhadap Inovasi Pendidikan di Indonesia, Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 21, No. 3, 2015

- Dewinta Aulia Savitri, Retno Susanti, Erna Retna Safitri, & Fakhili Gulo, “Menelaah Keberhasilan Sistem Pendidikan Sekolah Dasar di Jepang untuk Diterapkan di Indonesia,” *Dharmas Education Journal*, Universitas Sriwijaya, 2022.
- Dwi Prasetyo, Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pendidikan Amerika Serikat, *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 4, No. 2, 2017
- Hidayat, Ahmad. “Sistem Pendidikan Jepang dan Relevansinya dengan Pendidikan di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga*, Vol. 8, No. 1, 2021.
- Ida Fitriyah, “Sistem Pendidikan Jepang dan Implikasinya terhadap Pendidikan Indonesia,” *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 2021.
- Lengkong, Jeffry S. J. et al., “Perbandingan Sistem Pendidikan Inklusif di Jepang dan Indonesia: Pendidikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus,” *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 2025.
- Lestari, Fitri. “Pembentukan Karakter melalui Pendidikan di Jepang.” *Jurnal Pendidikan Karakter Universitas Negeri Yogyakarta*, Vol. 10, No. 2, 2020.
- Marlina & Dede Rosyada, “Profesionalisme Guru dalam Perspektif Pendidikan Jepang,” *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 10 No. 2, 2021.
- Nur Hanifa, Mutiara Rahmi, Wan Muhammad Fariq, & Muhammad Suprpto, “Kurikulum Pendidikan di Indonesia dan Jepang: Sebuah Analisis Komparatif,” *Akademika: Jurnal Keagamaan dan Pendidikan*, Vol. 20 No. 1, 2024.
- Nurhayati & Sri Sumarni, “Implementasi Pendidikan Karakter: Komparasi Pendidikan Dasar di Indonesia dan Jepang,” *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia (JPION)*, Vol. 4 No. 2, 2021.
- Nurhayati & Sri Sumarni. “Implementasi Pendidikan Karakter: Komparasi Pendidikan Dasar di Indonesia dan Jepang.” *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia (JPION)*, Vol. 4 No. 2, 2021.
- Nurhayati, Nurhayati & Sri Sumarni. “Implementasi Pendidikan Karakter: Komparasi Pendidikan Dasar di Indonesia dan Jepang.” *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia (JPION)*, vol. 4 no. 2 (2021–2023)
- Nurul Hidayah, Analisis Sistem Pendidikan Amerika Serikat dalam Perspektif Manajemen Pendidikan, *Jurnal Administrasi Pendidikan*, Vol. 6, No. 2, 2018
- Purwantiningsih, Ary; Suharso, Pudjo; Ismaya, Erik Aditia. “Pendidikan untuk Memecahkan Masalah Bangsa melalui Peningkatan Profesionalisme Guru (Belajar dari Pengalaman Jepang).” *Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, vol. 9 no. 1, 2018.
- Purwantiningsih, Ary; Suharso, Pudjo; Ismaya, Erik Aditia. “Pendidikan untuk Memecahkan Masalah Bangsa melalui Peningkatan Profesionalisme Guru (Belajar dari Pengalaman Jepang).” *Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, Vol. 9 No. 1, 2018.

- Rahmawati, Dian. "Desentralisasi Pendidikan di Jepang dan Implikasinya bagi Pengembangan Kurikulum." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Universitas Negeri Yogyakarta, Vol. 11 No. 1, 2020.
- Rina Mardiana, *Kurikulum dan Pembelajaran di Amerika Serikat: Pelajaran untuk Indonesia*, *Jurnal Kajian Pendidikan*, Vol. 8, No. 1, 2020
- Sari, Dwi Ayu. "Profil Negara Jepang dalam Perspektif Hubungan Internasional." *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Vol. 5, No. 1, 2019.
- Sukardi, Imam. "Manajemen Pendidikan Jepang dan Relevansinya dengan Indonesia." *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Universitas Negeri Malang, Vol. 17, No. 3, 2019.
- Sutrisno, "Internalisasi Pendidikan Moral pada Perguruan Tinggi di Jepang," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2020.
- Sutrisno. *Internalisasi Pendidikan Moral pada Perguruan Tinggi di Jepang*. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, UNY.
- Utami, Rina. "Budaya Kerja Jepang dan Implikasinya bagi Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Diponegoro*, Vol. 12, No. 2, 2020.